
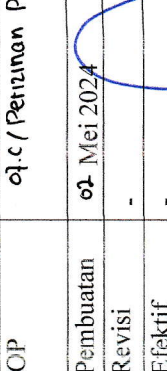


PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DINAS PERHUBUNGAN

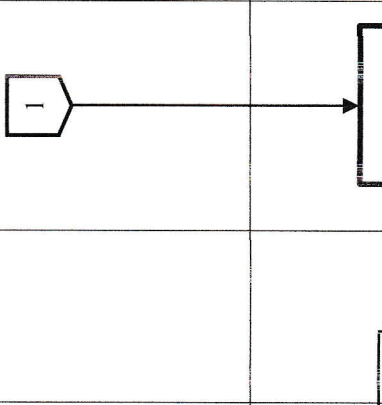
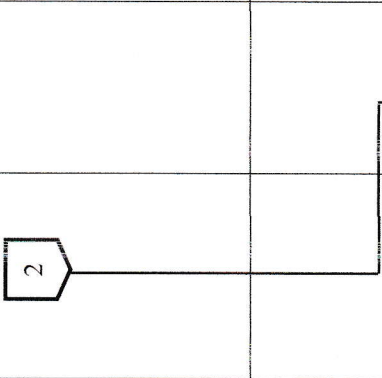
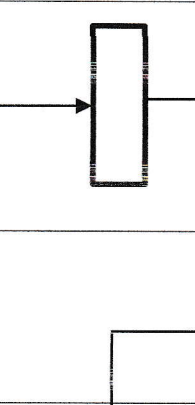
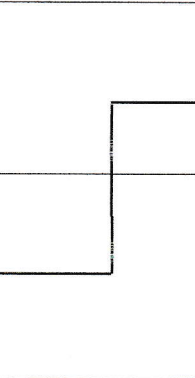
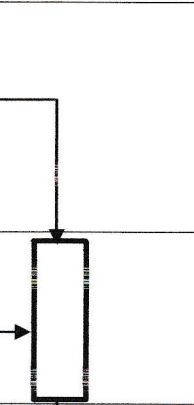
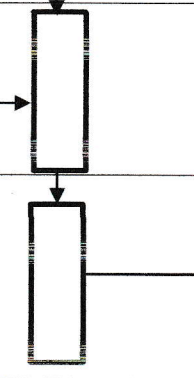
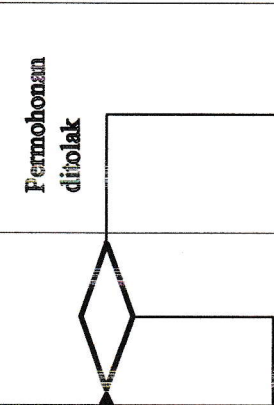
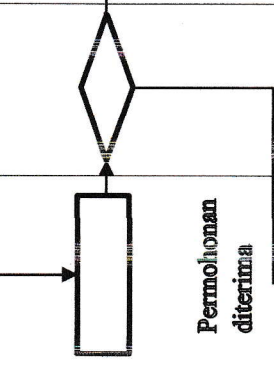
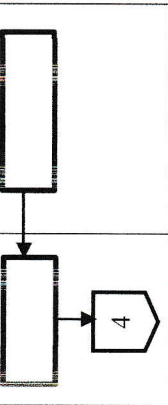
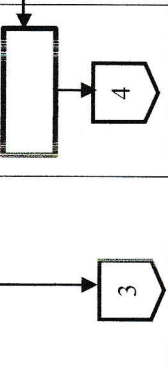
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

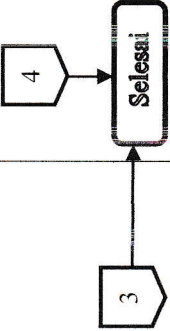
PROSES PERIZINAN PENGOPERASIAN KAPAL PADA LINTAS  
PENYEBERANGAN  
TAHUN 2024

	<b>PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PERHUBUNGAN</b>	07-c / Perizinan Pengoperasian Kapal / DIBWA
Nomor SOP	02 Mei 2024	Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi	-	Tanggal Efektif
Disahkan oleh	Kepala Dinas	
Judul SOP	Perizinan Pengoperasian Kapal pada Lintas Penyeberangan	Dis. ASBAN ARIS, MH. NIP. 19660324 199412 1 003
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kep. Bangka Belitung.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kab. Bangka Selatan, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Barat, dan Kab. Belitung Timur di Provinsi Kep. Bangka Belitung.</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan.</li> <li>5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan.</li> </ol>	Kualifikasi pelaksana
Keterangan	Peralatan/perlengkapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer/Laptop.</li> <li>2. Alat tulis kantor.</li> </ol>
Peringatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apabila sampai batas waktu yang diberikan Badan Usaha Angkutan Penyeberangan tidak mengadakan kapal yang memenuhi persyaratan teknis yang akan dioperasikan, maka persetujuan pendahuluan tidak berlaku lagi.</li> </ol>	Catatan

**PROSEDUR TATA CARA PERIZINAN PENGOPERASIAN KAPAL**

No.	Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	Mutu Baku		Keterangan
		Dinas Perhubungan Prov. Babel	Gubernur	Badan Usaha Angkutan Penyeberangan		Waktu	Output	
1.	<p>Badan Usaha Angkutan Penyeberangan mengajukan permohonan izin pengoperasian kapal penyeberangan kepada Gubernur dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Surat izin usaha angkutan penyeberangan.</li> <li>Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal.</li> <li>Surat dan dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara.</li> <li>Lintas yang dilayani.</li> <li>Spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan dan pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan.</li> <li>Bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta).</li> </ol>				Persyaratan permohonan izin			
2.	Setelah mengajukan permohonan persetujuan pengoperasian kapal angkutan				Persyaratan permohonan izin	18 bulan	Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal	

	<p>penyebangan Badan Usaha Angkatan Penyeberangan yang belum memiliki kapal diberikan Persetujuan Pendahuluan Pengadaan Kapal Angkatan Penyeberangan yang berlaku 18 (delapan belas) bulan.</p>			<p>Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal</p>	<p>6 bulan</p>	<p>Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal yang diperpanjang</p>	
<p>3.</p>	<p>Dalam hal pengadaan kapal baru yang belum selesai pembangunannya, persetujuan pendahuluan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan setelah dilakukan evaluasi oleh Dirjen.</p>			<p>Persyaratan permohonan</p>	<p>7 hari (sejak permohonan diterima secara lengkap)</p>	<p>-</p>	
<p>4.</p>	<p>Gubernur sesuai kewenangannya melakukan penelitian aspek teknis dan aspek hukum atas persyaratan permohonan persetujuan pengoperasian kapal.</p>			<p>-</p>	<p>Sesuai kebutuhan</p>	<p>Hasil penelitian aspek teknis dan aspek hukum</p>	
<p>5.</p>	<p>Setelah penelitian persyaratan dilakukan, apabila persyaratan terpenuhi maka dapat diterbitkan persetujuan dan apabila persyaratan tidak lengkap maka Gubernur dapat menolak dan mengembalikan permohonan disertai alasan penolakan.</p>			<p>-</p>	<p>Sesuai kebutuhan</p>	<p>Hasil penelitian aspek teknis dan aspek hukum</p>	
<p>6.</p>	<p>Permohonan yang ditolak dapat diajukan kembali setelah pemohon melengkapi persyaratan.</p>			<p>Permohonan baru</p>	<p>Sesuai kebutuhan</p>	<p>Hasil penelitian aspek teknis dan aspek hukum</p>	

7.	Apabila persyaratan telah dipenuhi maka Gubernur dapat menerbitkan Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan.	 <pre> graph TD     3{{3}} --&gt; 4{{4}}     4 --&gt; Selesai[Selesai] </pre>	Permohonan dan persyaratan permohonan	Sesuai kebutuhan	Kajian potensi perekonomian daerah
----	--	--	---------------------------------------	------------------	------------------------------------

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

*(Handwritten Signature)*

**Drs. ASBAN ARIS, MH  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP 19660224 199412 1 003**